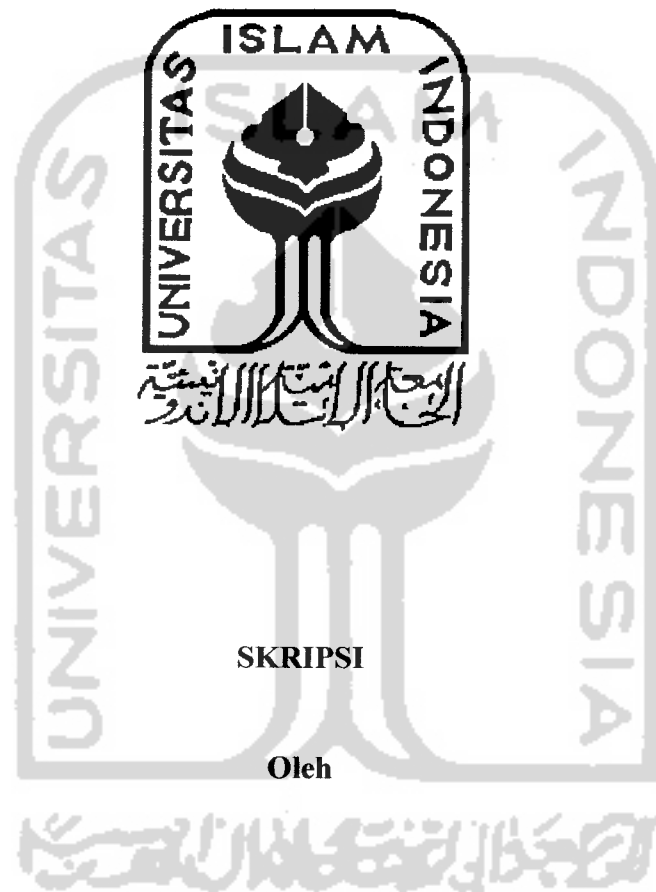


**PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATRA**

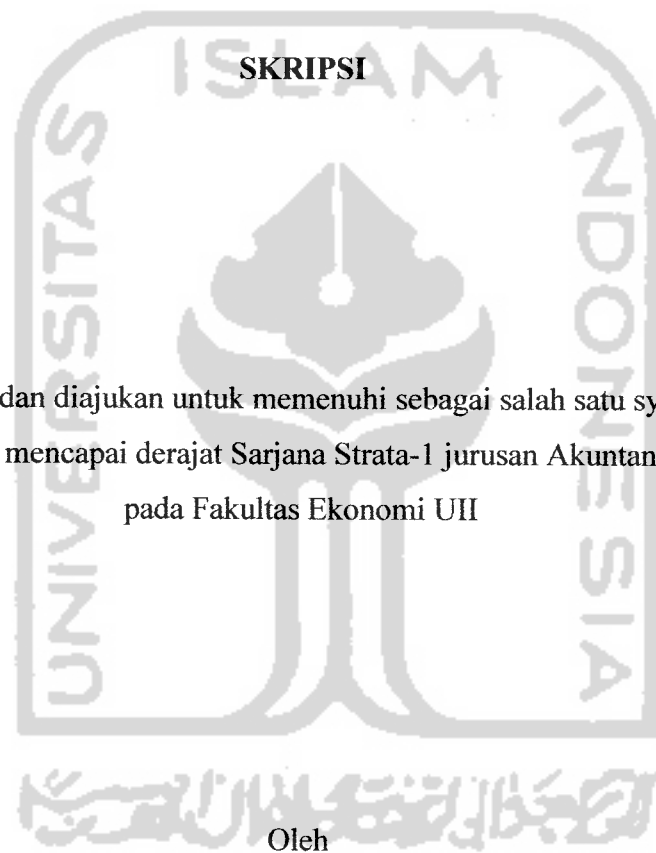


Nama : Eva Rihandhini
Nomor Mahasiswa : 03312031

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2007

**PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATRA**



disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh

Nama : Eva Rihandhini
Nomor Mahasiswa : 03312031

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

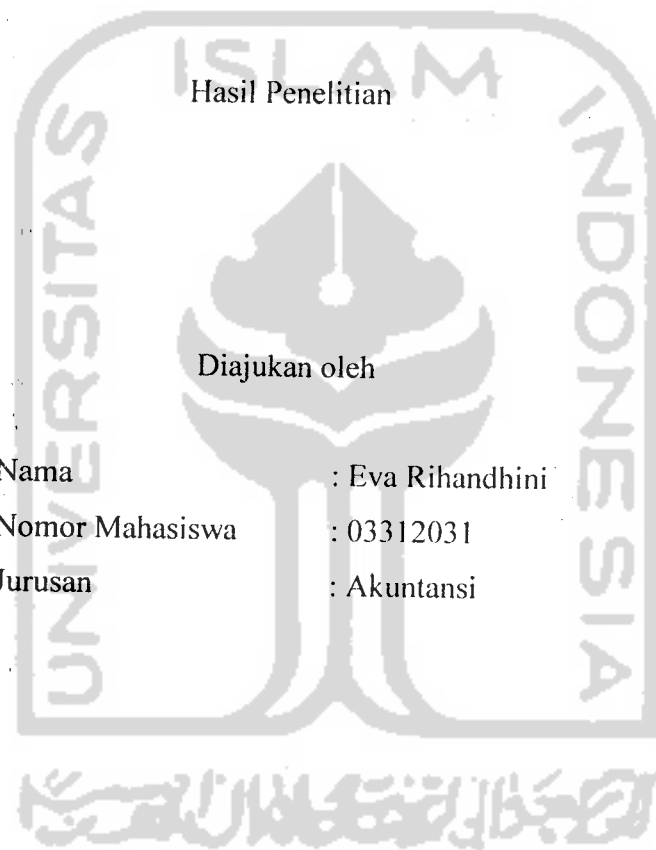
” Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sebagai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,.....2007

Penyusun,

Eva Rihandhini

**PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATRA**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal... 25-1-2007

Dosen Pembimbing,

(Drs. Johan Arifin, M.Si)

MOTTO

“When we succeed, we are thankful.

When we fail, we are also thankful.

The true happiness and wealth are

In the thankful attitude itself.”

“Our true selves are human beings!

There is no reason why we should

Feel either smaller or less

Significant than others.

If they can succeed and so can we!”

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ سَبِقَ الْإِتْقَانُ

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibu, terima kasih atas do'a dan tahajudnya yang selalu mengiringi perjalanan hidupku yang selalu mengharap yang terbaik buat aku.

Ismu Indra Prabawa, terima kasih buat pengertian, perhatian dan segala yang telah kamu berikan.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, atas segala karunia dan rahmat-Nya yang tak terhitung berupa kasih sayang, nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untaian sholawat tak lupa penulis sanjungkan kepada Rosulullah Muhammad Shollallaahu Alaihi Wa Sallam yang dinantikan syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan untuk melatih diri agar peka terhadap perkembangan ilmu khususnya dalam Bidang Ekonomi.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja banyak menemui masalah dan kendala. Faktor – faktor tersebut tidak akan teratasi tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak baik secara moral maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Johan Arifin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan segala kemudahan, masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta atas segala doa dan tahajudnya.
3. Ismu Indra Prabawa atas segala pengertian, motivasi dan segala bantuannya. Sosok yang membawa perubahan, inspirasi dan dengan sabar memberikan cinta, perhatian, pengertian bagi penulis.
4. Mbak Lia dan keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan, dukungannya dan terima kasih atas bantuan dalam mencari data skripsi sampai ke Jakarta
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Teman-teman seperjuangan Noris, Wie, Fanti terima kasih atas semangat dan bantuannya
7. Mbak Arista terima kasih atas konsultasinya selama bab IV
8. Mbak Dhini dan UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kota Kudus Jakarta Selatan
9. Teman – teman sesama bimbingan Bapak Johan Arifin atas diskusi dan masukannya selama menunggu bimbingan.
10. Semua pihak – pihak lain yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Di sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan pada diri penulis yang masih dalam taraf

belajar. Maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun baik mengenai isi, pembahasan ataupun segala hal sangat diharapkan oleh penulis. Harapan penulis semoga sesuatu yang telah dikerjakan dapat dimanfaatkan secara optimal serta mendapatkan hikmah yang berharga dari apa yang dirasakan selama penyusunan skripsi.

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|----------|
| Halaman Judul | ii |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme | iii |
| Halaman Pengesahan | vi |
| Halaman Berita Acara | v |
| Halaman Motto | vi |
| Halaman Persembahan | vii |
| Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Tabel | xiii |
| Daftar Gambar | xiv |
| Daftar Lampiran | xv |
| Abstrak | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Pertumbuhan Ekonomi..... | 6 |
| 2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 10 |
| 2.3. Belanja Pembangunan | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4. Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis | 16 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Data | 28 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 30 |
| 3.4. Model Penelitian..... | 34 |
| 3.5. Metode Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 37 |
| 4.1. Analisis Hasil Regresi Sederhana | 37 |
| BAB V PENUTUP..... | 47 |
| 5.1. Kesimpulan | 47 |
| 5.2. Keterbatasan Penelitian | 49 |
| 5.3. Saran | 50 |
| 5.4. Implikasi | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |
| LAMPIRAN..... | 56 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Hal |
|--|-----|
| 4.1. Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi | 38 |
| 4.2. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah | 41 |
| 4.3. Pengaruh PAD terhadap Belanja Pembangunan | 44 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Hal |
|---|-----|
| 3.1. Model Penelitian ($HA_1 - HA_2$) | 34 |
| 3.2. Model Penelitian HA_3 | 35 |



DAFTAR LAMPIRAN

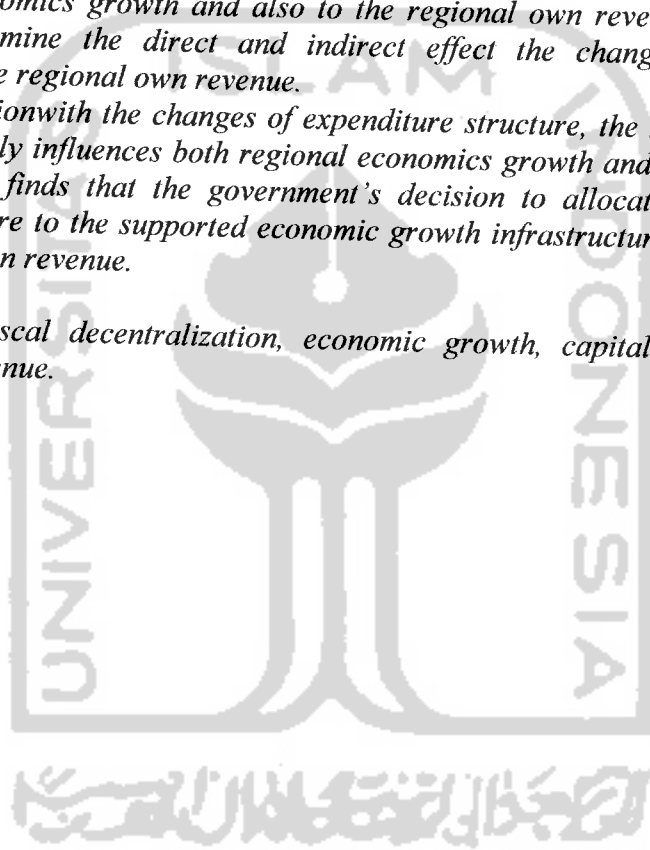
| Lampiran | | Hal |
|----------|---|-----|
| 1. | Ringkasan Realisasi Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatra Tahun Anggaran 2001-2005 | 56 |
| 2. | Ringkasan Realisasi Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatra Tahun Anggaran 2001-2005 | 61 |
| 3. | Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatra Tahun Anggaran 2001-2005 | 67 |
| 4. | Hasil Pengolahan Data Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Sumatra Tahun Anggaran 2001-2005 | 73 |

Abstracts

Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because the governments have informational advantages concerning resource allocation. The governments are in the better position to provide the kind of public goods and services that closely meets the local needs. This study tends to examine the impact of the changes of expenditure structure both to the economics growth and also to the regional own revenue. It is also intended to examine the direct and indirect effect the changes of capital expenditure to the regional own revenue.

In relationwith the changes of expenditure structure, the research finds that it significantly influences both regional economics growth and regional own revenue. It also finds that the government's decision to allocate the greater capital expenditure to the supported economic growth infrastructures will brings more regional own revenue.

Key Words : Fiscal decentralization, economic growth, capital expenditure, regional own revenue.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijaksanaan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono (dalam Sidik et al, 2002:v), tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiscal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Disamping dari dana perimbangan tersebut Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah,

maupun lain – lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Saragih, 2003). Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik

terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Kestinambungan pembangunan daerah relatif lebih tercermin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Implikasi dari kebijakan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun studi empirisnya yang juga masih terus berkembang. Pada awalnya yang lebih diperhatikan adalah kuantitas pengeluaran pemerintah, namun pada tahap selanjutnya aspek-aspek lain dari kebijakan fiskal pemerintah tersebut dirasa perlu untuk diamati. Selain efektifitas atau efisiensi dari pengeluaran pemerintah baik besarnya Size dan alokasi sektoralnya, dampak dari cara pemerintah dalam membiayai pengeluarannya terhadap pertumbuhan ekonomi juga memerlukan area studi yang menarik. Seperti disebutkan oleh Aschauer (2000), Persoalan kebijakan fiskal pemerintah mencakup "*how much you have*", "*how you pay for it*" dan "*how you use it*"

Brata dan Arifin (2003) juga telah mencoba menganalisis aspek fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Namun,

seperti juga kecenderungan studi-studi yang telah dikemukakan di atas, aspek fiskal yang diamati belum mencakup sisi penerimaan maupun komposisinya tetapi baru pada sisi pengeluaran khususnya pengeluaran pembangunan sebagai proksi dari investasi sector public local. Sementara itu aspek penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu isu krusial bagi Indonesia. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tahun 1999, pemerintah daerah baik tingkat propinsi (Dati I) maupun kabupaten/kota (Dati II) lebih banyak tergantung pada pemerintah pusat (Kuncoro, (1995). Dalam hal ini, andil subsidi dari pemerintah pusat dalam struktur penerimaan pemerintah daerah sangat tinggi, jauh melebihi penerimaan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian Priyo Hari Adi (2006) yang meneliti hubungan antara Pertumbuhan ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah di Jawa dan Bali. Dan perbedaan yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitiannya, yaitu di wilayah Sumatra.

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemandirian daerah ?
2. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan (modal) ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Seperti yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Penelitian ini merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah
 - b) Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi di Pemerintahan.
2. Bagi Pemerintah
 - a) Memberi masukan bagi pemerintah, khususnya sejauh mana Pemerintah Daerah dimasa otonomi menetapkan tingkat pengeluaran/belanja daerahnya masing-masing.
 - b) Membuka wawasan baru mengenai pengaruh Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
3. Bagi dunia akademisi
Dapat memperkaya topik kepustakaan, khususnya di bidang Akuntansi Pemerintahan/ Sektor Publik.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Sumber utama pertumbuhan juga berasal dari peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Ditengah kesulitan pengerahan sumber-sumber dana investasi, maka produktivitas masyarakat dan efisiensi perekonomian perlu terus diupayakan peningkatannya guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Selama Repelita VI, sekitar 22 persen dari pertumbuhan ekonomi diharapkan berasal dari peningkatan produktivitas masyarakat sejalan dengan itu, produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan nisbah nilai tambah per pekerja, diharapkan akan meningkatkan rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dipahami bahwa usaha peningkatan produktivitas nasional pada dasarnya berkaitan dengan 3 hal pokok. Yang pertama bahwa proyek-proyek pembangunan, baik di sektor negara maupun sektor swasta, perlu dipilih secara tepat sehingga seluruh dana yang terkumpul dapat dialokasikan kepada proyek-proyek yang paling produktif, menunjang ekspor nonmigas, serta memperluas lapangan kerja. Kedua, produktivitas nasional

berkaitan secara langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga program nasional di bidang pendidikan dan latihan harus mendapatkan perhitungan yang cukup besar. Ketiga, pemakaian teknologi tepat guna harus diterapkan disemua tingkat produksi, agar tidak saja diperoleh produktivitas yang optimal tetapi juga memberikan landasan bagi penerapan teknologi tinggi di masa mendatang.

Menurut Sadono Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ketahun. Dengan perkataan lain, perkembangan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya.

Paul A Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, perubahan teknologi dan inovasi.

Boediono (1992) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 10, 20 tahun atau 50 tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber dari proses internal perekonomian itu artinya harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian itu sendiri.

Menurut Todaro (1997) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah :

- 1) Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital.
- 3) Kemajuan teknologi.

Masalah pertumbuhan dan pemerataan senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya. Kedua hal ini sering diperhadapkan dalam sejarah pemikiran ekonomi ada saja sekelompok minoritas yang terus bertabrakan dengan kelompok mainstream. Hal ini tidak terkecuali dengan pendapat mereka mengenai kaitan antara pertumbuhan dan pemerataan. Hubungan antara keduanya sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disatu pihak ada yang berpendapat sebaliknya.

Kelompok yang kedua inilah yang didunia internasional termasuk minoritas. Memang jumlah negara yang berhasil memadukan antara pertumbuhan dengan pemerataan tidak banyak, justru yang banyak adalah yang berhasil menciptakan pertumbuhan yang tinggi tetapi dibarengi oleh ketimpangan yang semakin lebar.

Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan perkapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Sedangkan PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian daerah yakni:

1. Pertanian, perikanan dan kelautan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan restoran
7. Angkutan dan komunikasi

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

9. Jasa-jasa

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.2.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002)

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

a. Pajak Propinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Jenis pajak Kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan

7. Pajak Parkir

2.2.2. Retribusi

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan:

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dan lain – lain.
2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus

Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Penyedotan Kakus; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain – lain.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek dan lain – lain.

2.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis pendapatan ini antara lain, bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah dan lain - lain. UU mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah.

2.2.4. Lain – lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam rincian penerimaan lain – lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang – barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain – lain

2.3. Belanja Pembangunan

Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/ 2002 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat).

Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus menerus untuk setiap tahun fiscal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh: belanja gaji dan honorarium pegawai), sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (*highway*), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum dan sebagainya. Belanja pembangunan non-fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, dan pelaksanaannya mengacu pada pola dasar pembangunan daerah serta rencana pembangunan lima tahun masing-masing daerah. Dengan melihat penggunaan anggaran belanja pembangunan dalam APBD, dapat dilihat cerminan arahan

pembangunan suatu daerah yang seyogyanya merupakan bagian integral dari Repelita VI secara nasional. Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi internasional dan regional hingga saat ini, maka dalam memasuki tahun anggaran 1997/98 pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih besar dalam penyusunan anggaran pembangunannya.

Belanja pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal/pembangunan terdiri dari belanja tanah; belanja modal jalan dan jembatan; belanja modal bangunan air (irigasi); belanja modal instalasi; belanja modal jaringan; belanja modal bangunan gedung; belanja modal monumen; belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, alat-alat studio; belanja modal alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/ perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya ; belanja modal hewan ternak serta tanaman; belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan.

Belanja Pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam daftar isian proyek daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek disetiap sektor/subsektor.

Belanja Pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan anggaran belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung kantor yang baru dan direnovasi sedapat mungkin ditunda. Penggunaan dana lebih diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemulihan kondisi ekonomi serta pembukaan lapangan kerja. Apabila sangat mendesak dimungkinkan untuk melakukan sewa gedung
2. Pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk antar jemput pegawai, dan pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampah, dan untuk kendaraan sejenis lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk kepentingan operasional legislatif dan eksekutif supaya dihindari.
3. Pembagian Belanja Pembangunan ke dalam Sektor, Subsektor dan Program yang selama ini berlaku masih tetap dipakai secara selektif sesuai dengan kebutuhan Daerah.

2.4. Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis

Dalam perspektif teori keagenan, Inman (1979) dan Rubenfeld (1987) (dalam Holzt-Eakin et al, 1994), Aaberg & Langorgen (1997), dan Slack (1980) menyatakan agen (*agent*) atau politisi di pemerintahan daerah bersikap seolah – olah mereka memaksimalkan utilitas individu (*voter*) berpendapat menengah ke

bawah di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan belanja publik untuk periode tertentu, agen akan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya berdasarkan ekspektasinya terhadap lingkungan ekonomi pada masa yang akan datang. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada periode tertentu tergantung pada ketersedianya sumber daya pada periode yang bersangkutan, namun dengan batasan aturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang (*balanced-budget rule*).

Dalam konsep anggaran berimbang Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau bagaimana komponen – komponen pengeluaran ditentukan (Holzt-Eakin et al, 1994). Oleh karena itu Pemda dapat melakukan *smoothing* atas pengeluaran – pengeluarannya karena memang tidak ada aturan yang secara efektif digunakan untuk mencegahnya. Hal ini juga terjadi di Norwegia (Aaberge & Langorgen, 1997), dimana kebebasan untuk membuat prioritas atas pengeluaran untuk melayani masyarakatnya, meskipun tidak mutlak. Menurut Inman (1983 dalam Holzt-Eakin et al, 1994), pembuatan keputusan dalam sektor publik *backward-looking*. Di sisi lain, time horizon agen lebih panjang dari satu tahun anggaran, sehingga pada praktiknya beberapa pemda membentuk *rainy day funds* untuk memudahkan *smooth* atas pengeluarannya atau menyusun anggaran untuk siklus beberapa (*multiyear budget*).

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan yang memadai. Semakin besar

keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Hal ini telah dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1993), bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Karena apabila suatu keadaan keuangan daerah tidak menguntungkan akan mendatangkan dampak yang cukup luas bagi bidang-bidang kegiatan lainnya.

Sementara itu, Rejo (1995) menyatakan bahwa, posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjukkan posisi tingkat keotonomian suatu daerah, karena dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah secara baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup. Namun dalam kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri adalah masih rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Daerah Tingkat II. Hal ini dikemukakan Kaho (1995), bahwa belum ada satupun DATI II di Indonesia yang dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya secara penuh (100%), baik secara keseluruhan maupun urusan demi urusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (1995) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi PAD terhadap penerimaan Dati II yaitu : (1) banyak sumber pendapatan yang besar yang digali

dari suatu Dati II tetapi berada di luar wewenang pemda yang bersangkutan untuk memungutnya. (2) BUMD pada umumnya belum menjadi sumber penerimaan yang andal, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi serta pungutan lain, (4) Kurangnya kemampuan aparaturnya dalam menggali sumber pendapatan yang ada, (5) rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat.

Devas (1999) menyatakan bahwa kewenangan Daerah Tingkat II menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada sumbangan dari atas yaitu: 73% dari anggaran rutin dan 87% dari anggaran pembangunan berasal dari pemerintah pusat. Dari penerimaan Dati II secara keseluruhan sumber PAD sendiri menyumbang 10%. Hoessein (2000) menyatakan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan dan PAD yang dimiliki daerah.

2.4.1. Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997)

Untuk mempercepat pembangunan, kebutuhan akan modal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Modal tersebut harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu : sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi dan stok barang kapital. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok kapital yang ada. (Boediono, 1999)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana kebijaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional searah. Hal ini terlihat dari program-program pembangunan yang selalu memperhatikan aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilisasi. Sumbangan dan bantuan pusat kepada daerah menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah lebih mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah yaitu berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II : meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah dan makin terkoordinasi pembangunan antar

sektor dan antar daerah serta antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah (Sumodiningrat, 1997)

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dan Dati I yang cukup besar. Keadaan ini tercermin dari sisi penerimaan yaitu relatif rendahnya PAD, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan yang dihadapi daerah dimana daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaannya yang dapat dilakukan dengan memacu produktifitas dan kegiatan-kegiatan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan pengeluaran pembangunan guna membangun sarana dan prasarana dalam menunjang tumbuhnya investasi swasta yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperlihatkan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dimungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan

tersebut tentu akan membawa prospek baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akhirnya untuk mencapai hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan partisipasi dari para stakeholders di daerah serta keseriusan dan kerelaan pusat memberikan pembinaan dan dukungan. Tanpa keterlibatan para stakeholders dan dukungan pusat tersebut akan sulit bagi daerah dalam melaksanakan menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan konsep dan temuan diatas, maka hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai berikut :

HA_1 : Belanja Modal (Pembangunan) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik.

Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002)

Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi.

Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini :

- 1) Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
- 2) Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Seperti pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari

pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Hal ini telah dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1993), bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Karena apabila suatu keadaan keuangan daerah tidak menguntungkan akan mendatangkan dampak yang cukup luas bagi bidang-bidang kegiatan lainnya.

Sementara itu, Rejo (1995) menyatakan bahwa, posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjukkan posisi tingkat keotonomian suatu daerah, karena dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah secara baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup. Namun dalam kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri adalah masih rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Daerah Tingkat II. Hal ini dikemukakan Kaho (1995), bahwa belum ada satupun DATI II di Indonesia yang dapat menyelenggarakan urusan rumah

tangganya secara penuh (100%), baik secara keseluruhan maupun urusan demi urusan.

Hasil penelitian Usman (1997) menunjukkan sumber PAD belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam APBD. Hal ini disebabkan (1) kebijaksanaan keuangan daerah dalam peningkatan PAD tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah, (2) ketiadaan data base tentang pajak dan retribusi daerah, (3) adanya kelemahan dalam penggolongan pajak dan retribusi daerah (aspek administrasi) yang berkaitan dengan perencanaan, sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola PAD, (4) rendahnya kemampuan dan kualitas aparat pengelola PAD.

Untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah, diperlukan kebijakan di bidang pengembangan institusi dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan disini merupakan usaha penyempurnaan lembaga keuangan daerah, penerapan sains dan teknologi, sistem dan prosedur serta kekayaan daerah (Tambunan, 1996)

Kristiadi (1991) menyarankan bahwa agar sumber-sumber pembiayaan ideal berkaitan dengan PAD, maka (1) seyogyanya lebih dititik beratkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber retribusi. Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat sekaligus memacu peningkatan pelayanan, dan (2) pajak-pajak daerah cukup ditetapkan secara limitatif pada objek-objek yang cukup potensial, bagi pajak yang kurang potensial seyogyanya dihapuskan.

Usaha-usaha intensivikasi dan ekstensivikasi sumber-sumber, menurut Rejo (1995), sangat tergantung pada kreativitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Kebijakan dan usaha intensivikasi adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada saat ini. Sedangkan kebijakan ekstensivikasi adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Selanjutnya dengan keleluasaan yang dimiliki, Pemda dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan PAD serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang ada bagi pembangunan daerah lebih lanjut.

Berdasarkan konsep dan temuan diatas, maka hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai berikut :

HA_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2.4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al. 2000; Blackly, 1986; Joulfaian &

Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al. 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al, 1986). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintahan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara di Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan dalam dua rentan waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sedangkan sampel untuk tahun sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mengetahui.

Hipotesis alternatif untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja pembangunan adalah sebagai berikut:

H_{A_3} : Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap
Belanja Pembangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diseluruh pemerintah kabupaten/ kota di Sumatra yang berupa realisasi belanja pembangunan/modal, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota yang ada dan juga data Produk domestic regional bruto (PDRB) harga konstan 2000 dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Adapun Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatra sendiri terdiri dari 10 Provinsi, dan pada tahun 2003 beberapa provinsi terjadi pemekaran wilayah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertambah 5 pamarintah kabupaten dan 2 pemerintah kota, sehingga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari 20 pemerintahan kabupaten/ kota, yang terbagi menjadi 16 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota; Provinsi Sumatra Utara bertambah 2 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota, sehingga terdiri dari 22 pemerintahan kabupaten/kota, yang terbagi menjadi 14 pemerintah kabupaten dan 7 pemerintah kota; Provinsi Sumatra Barat bertambah 1 pemerintah kota, sehingga terdiri 16 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 9 pemerintah kabupaten dan 7 pemerintah kota; Provinsi Riau bertambah 1 pemerintah kota, sehingga terdiri dari 16 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 12 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota; Provinsi Jambi yang terdiri dari 10 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 9 pemerintah kabupaten dan 1

pemerintah kota; Provinsi Sumatra Selatan bertambah 1 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota, sehingga terdiri dari 11 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota; Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 4 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 3 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota; Provinsi Lampung yang terdiri dari 10 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 8 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertambah 3 pemerintah kabupaten, sehingga terdiri dari 6 pemerintahan kabupaten/kota yang terbagi menjadi 5 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota. Sehingga jumlah keseluruhan pemerintahan kabupaten/kota yang terdapat di pulau Sumatra sampai tahun 2005 berjumlah 120 pemerintahan kabupaten/kota.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Cara pemilihan data akan dilakukan secara tidak random atau bersifat purposive. Purposive sampling adalah penentuan sample berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari *misspesifikasi* dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu pemilihan data secara purposive ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representative berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang berada di wilayah Pulau Sumatra
2. Pemerintah daerah yang menyertakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2001-2005

3. Produk Domestik Regional Bruto pada harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2001-2005

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya. Peneliti mendapatkan data realisasi APBD kabupaten/ kota se-Pulau Sumatra dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Badan Pusat Statistik Yogyakarta maupun Badan Pusat Statistik Jakarta juga dari situs internet Departemen Keuangan dengan alamat website www.depkeu.go.id

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Definisi Operasional

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang

telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Sedangkan PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian daerah yakni:

1. Pertanian, perikanan dan kelautan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan restoran
7. Angkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

Besarnya Pertumbuhan Ekonomi dari masing-masing pemerintah daerah di Sumatra dapat dilihat pada lampiran 1, halaman 56 - 61

b. Belanja Pembangunan

Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/ 2002 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode

anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat).

Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus menerus untuk setiap tahun fiscal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh: belanja gaji dan honorarium pegawai), sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (*highway*), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum dan sebagainya. Belanja pembangunan non-fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Belanja Pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam daftar isian proyek daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek disetiap sektor/subsektor.

Besarnya Belanja Pembangunan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Sumatra dapat dilihat pada lampiran 2, halaman 62 - 67

c. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No.

33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Besarnya PAD yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Sumatra dapat dilihat pada lampiran 3, halaman 68 - 73

3.3.2. Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel – variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

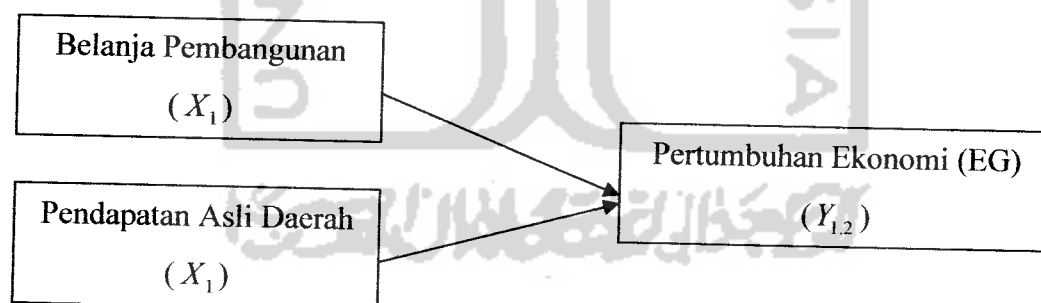
1. Variabel tergantung (*dependent variable*), dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah Pertumbuhan Ekonomi untuk melihat pengaruh Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk melihat pengaruh PAD terhadap Belanja Pembangunan variabel tergantungnya adalah Belanja Pembangunan..
2. Variabel bebas (*Independent variable*), dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Belanja Pembangunan/Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota yang ada, sedangkan untuk melihat pengaruh PAD terhadap Belanja Pembangunan variabel

bebasnya adalah PAD dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada.

Baik variabel tergantung maupun variabel bebas pengukurannya sudah tersedia dalam laporan realisasi APBD pada masing – masing pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Sumatra, sehingga dalam hal ini peneliti bisa langsung mengambil data realisasi belanja pembangunan, data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan data PDRD diambil dari publikasi BPS. Data yang digunakan yakni data Produk Domestik Regional Broto (PDRB) harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2001-2005.

3.4. Model Penelitian

Untuk melihat model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pengaruh Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1 : Model Penelitian (H_{A1} – H_{A2})

Sedangkan untuk model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pengaruh PAD terhadap Belanja Pembangunan atau hipotesis alternatif 3 dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini :



Gambar 3.2 : Model Penelitian H_{A3}

3.5. Metode Analisis Data

Untuk menguji pengaruh Belanja Pembangunan dan Penerimaan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana (simple regression). Regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh masing – masing jumlah Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut :

$$EG_t = a + bX_t + e$$

Dimana :

EG_t = Pertumbuhan Ekonomi Daerah tahun berjalan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_t = Jumlah Belanja Pembangunan atau jumlah PAD

e = error term

Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan, persamaan regresinya sebagai berikut :

$$BP_i = a + bX_i + e$$

Dimana :

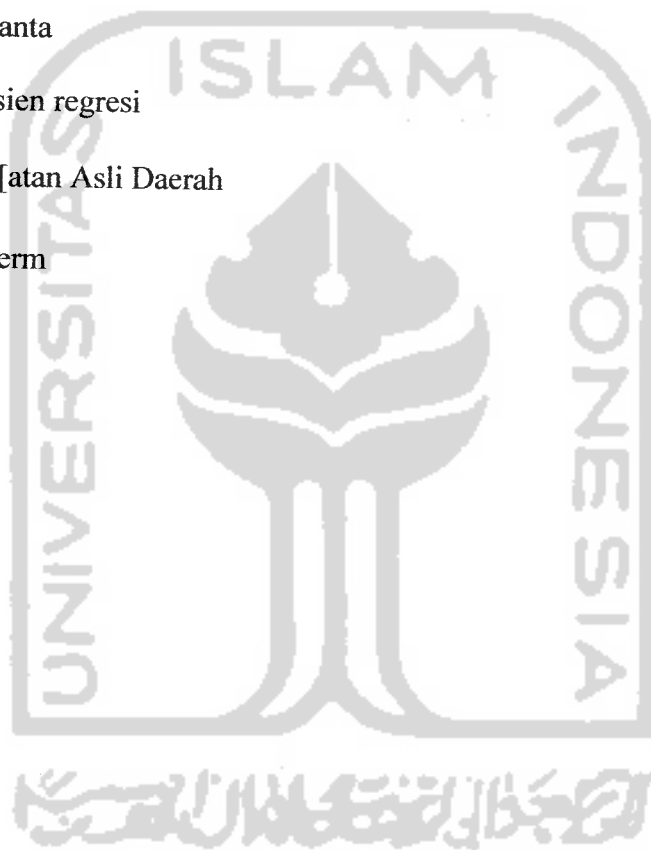
BP_i = Belanja Pembangunan tahun berjalan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_i = Pendapatan Asli Daerah

e = error term



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab II sebelumnya telah diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan analisis hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan dengan teori yang terkait dan hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pada dasarnya menyatakan memang ada hubungan antara ketiga variable tersebut.

Pada bab ini akan dibahas ada tidaknya pengaruh perubahan Belanja Pembangunan dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah dengan menggunakan data – data dan alat analisis yang telah dijabarkan pada bab III.

4.1. Analisis Hasil Regresi Sederhana

Regresi sederhana (*Simple Regresion*) digunakan untuk melihat pengaruh Belanja Pembangunan dan PAD secara terpisah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi.

4.1.1. Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh antara Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.1 di halaman berikutnya

TABEL 4.1

Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| $EG = 820286575,332 + 28,182 BP$ | |
| $Sig = 0,000$ | $t\text{-statistik} = 20,152$ |
| F-statistik = 406,097 | |
| $R(R^2) = 0,653(0,426)$ | |
| Adjusted - $R^2 = 0,425$ | |

Besarnya R-value (0,653) adalah lebih dari nilai kritis (0,5) yang direkomendasikan oleh Santoso (2000). Jadi R-value mengindikasikan korelasi antara Belanja Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi adalah kuat.

Dari uji ANOVA atau F test, menunjukkan nilai F hitung sebesar 406,097 dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebut 499. Pada kolom signifikansi didapat nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti H_0 diterima. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Pertumbuhan Ekonomi.

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi (estimasi) bagaimana pengaruh variabel independent terhadap besarnya perubahan variabel dependen. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai belanja pembangunan bertambah 1, maka nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tiap tahun akan bertambah 28,182 atau setiap nilai

belanja pembangunan bertambah 10 dan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap bulan akan bertambah sebesar 281,82. Pengambilan nilai-nilai belanja pembangunan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi harus dipertimbangkan secara rasional dan menurut pengalaman.

Dari hasil analisis statistik nilai t sebesar 20,152. Hal ini berarti Belanja Pembangunan (X1) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,425 yang berarti 42,5 % Pertumbuhan Ekonomi bisa dijelaskan oleh variabel Belanja Pembangunan. Dan sisanya sebesar 57,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Belanja Pembangunan mempunyai pengaruh signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bermakna bahwa pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan ini umumnya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dapat memberikan nilai tambah produksi. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Realitas ini di dukung temuan Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah tersebut harus memperhatikan antara lain : kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dimungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut tentu akan membawa prospek baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggaran pembangunan disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragamam antar daerah. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dan Dati I yang cukup besar. Keadaan ini tercermin dari sisi penerimaan yaitu relatif rendahnya PAD, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan yang dihadapi daerah dimana daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaannya yang dapat dilakukan dengan memacu produktifitas dan kegiatan-kegiatan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan pengeluaran pembangunan guna membangun sarana dan prasarana dalam menunjang tumbuhnya investasi swasta yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.2 di halaman berikutnya

TABEL 4.2

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| EG = 1396409973,394 + 113,786 PAD | |
| Sig = 0,000 | <i>t</i> -statistik = 19,779 |
| <i>F</i> -statistik = 391,205 | |
| $R(R^2) = 0,646(0,417)$ | |
| Adjusted - $R^2 = 0,416$ | |

Besarnya R-value (0,646) adalah lebih dari nilai kritis (0,5) yang direkomendasikan oleh Santoso (2000). Jadi R-value mengindikasikan korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi adalah kuat.

Dari uji ANOVA atau F test, menunjukkan nilai F hitung sebesar 391,205 dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebut 499. Pada kolom signifikansi didapat nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti H_0 diterima. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi (estimasi) bagaimana pengaruh variabel independent terhadap

besarnya perubahan variabel dependen. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah bertambah 1, maka nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tiap tahun akan bertambah 113,786. Pengambilan nilai-nilai Pendapatan Asli Daerah untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi harus dipertimbangkan secara rasional dan menurut pengalaman.

Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai t sebesar 19,779. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,416 yang berarti 41,6 % Pertumbuhan Ekonomi bisa dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah. Dan sisanya sebesar 58,4 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini bermakna bahwa komponen PAD yang didominasi oleh pajak dan retribusi tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Russek (1997) meneliti dengan menguji hubungan antara struktur fiskal dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Amerika Serikat. Dikemukakan bahwa permasalahan anggaran yang dihadapi dengan jalan meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian memberi kesimpulan, bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika penerimaan pajak itu digunakan untuk membangun infra struktur dan akan berpengaruh negatif jika digunakan untuk transfer payment.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan yang memadai. Semakin besar

keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Hal ini telah dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1993), bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Karena apabila suatu keadaan keuangan daerah tidak menguntungkan akan mendatangkan dampak yang cukup luas bagi bidang-bidang kegiatan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Seperti pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan proporsi semacam itu daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Selanjutnya dengan keleluasaan yang dimiliki, Pemda dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan PAD serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang ada bagi pembangunan daerah lebih lanjut.

4.1.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan

Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.3 dihalaman berikutnya

TABEL 4.3

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan

| | |
|--|-----------------------------|
| BP = 64617967,537 + 1,065 PAD | |
| Sig = 0,000 | <i>t</i> -statistik = 6,324 |
| <i>F</i> -statistik = 39,998 | |
| $R(R^2) = 0,261(0,066)$ | |
| <i>Adjusted - R</i> ² = 0,066 | |

Dari uji ANOVA atau F test, menunjukkan nilai F hitung sebesar 39,998 dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan derajat kebebasan penyebut 547. Pada kolom signifikansi didapat nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti H_0 diterima. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Belanja Pembangunan.

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi (estimasi) bagaimana pengaruh variabel independent terhadap besarnya perubahan variabel dependen. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah bertambah 1, maka nilai rata-rata Belanja Pembangunan daerah tiap tahun akan bertambah 1,065. Pengambilan nilai-nilai Pendapatan Asli Daerah untuk meramalkan Belanja Pembangunan harus dipertimbangkan secara rasional dan menurut pengalaman.

Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai t sebesar 6,324, hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Belanja Pembangunan (Y), sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,066 yang berarti 6,6 % Belanja Pembangunan bisa dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah. Dan sisanya sebesar 93,4 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Dari hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, artinya besarnya pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan besarnya PAD yang diterima oleh masing – masing Pemda itu sendiri, akan tetapi keterkaitan antar kedua variabel sangat lemah. Hal ini dikarenakan anggaran pembangunan daerah pada umumnya bersumber dari bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah terdiri atas bantuan umum dan bantuan khusus. Bantuan umum pada prinsipnya merupakan dana yang diserahkan penggunaannya kepada daerah dalam rangka pembanguana daerah, sedangkan bantuan khusus penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres. Di sini andil PAD yang digunakan untuk pembangunan lebih kecil dibandingkan dari bantuan dari pemerintah pusat. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, hal inilah yang membuat masing-masing pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan PADnya masing-masing sehingga akan memperkecil defisit, sehingga perubahan terhadap PAD karena terbatasnya potensi dan kemampuan daerah sebagai salah satu sumber

penerimaan daerah yang akan mempengaruhi besarnya belanja pembangunan masing-masing Pemda di Pulau Sumatra.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan juga data produk domestic regional bruto untuk keseluruhan Pemda di Pulau Sumatra dan hasil dari pengolahan data tersebut, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja Pembangunan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel yang bermakna apabila terjadi peningkatan belanja pembangunan maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bermakna bahwa pengeluaran pembangunan ini umumnya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dapat memberikan nilai tambah produksi. Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan

manusia, infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dimungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut tentu akan membawa prospek baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Sumatra. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel yang bermakna apabila terjadi peningkatan PAD maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bermakna bahwa komponen PAD yang didominasi oleh pajak dan retribusi daerah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena pendapatan dari pajak dan retribusi tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil ini senada dengan penelitian yang dilakukan Miller dan Russek (1997) yang memberi kesimpulan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jika penerimaan pajak itu digunakan untuk membangun infra

struktur dan akan berpengaruh negatif jika digunakan untuk transfer payment.

3. Hasil analisis dari hipotesis alternatif 3 juga menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Belanja Pembangunan di Pulau Sumatra. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel yang bermakna apabila terjadi peningkatan PAD maka akan diikuti dengan peningkatan Belanja pembangunan, akan tetapi keterkaitan antar kedua variabel sangat lemah. Hal ini dikarenakan anggaran pembangunan daerah pada umumnya bersumber dari bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah terdiri atas bantuan umum dan bantuan khusus. Bantuan umum pada prinsipnya merupakan dana yang diserahkan penggunaannya kepada daerah dalam rangka pembanguana daerah, sedangkan bantuan khusus penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres. Di sini andil PAD yang digunakan untuk pembangunan lebih kecil dibandingkan dari bantuan dari pemerintah pusat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan pada penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel kabupaten/kota di Provinsi pulau Sumatra sehingga tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk inferensi pada kasus di provinsi lain.

Data yang digunakan penelitian ini adalah lima tahun (2001, 2002, 2003, 2004, 2005) sehingga belum dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif. Untuk itu pada penelitian – penelitian berikutnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun untuk jumlah kabupaten/kota.

Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci sektor belanja pembangunan manakah yang memberikan kontribusi besar, baik terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Perlu dilakukan analisis sektoral lebih lanjut agar dapat diperoleh gambaran, sektor mana yang mampu meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya. Wong (2002) melakukan analisis ini dengan memilah belanja pembangunan menurut sektornya dan melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.3. Saran

Berdasarkan pembahasan, analisis hasil dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka penulis mengajukan saran :

- a. Melihat adanya pengaruh belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka Pemda perlu memperbaiki formulasi belanja pembangunan guna membangun sarana dan prasarana dalam menunjang tumbuhnya investasi swasta yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya sebagai salah satu indikator kemandirian daerah demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

- c. Karena PAD juga memiliki pengaruh terhadap belanja pembangunan maka pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah, sehingga kemampuan daerah dalam memenuhi APBDnya akan meningkat dengan harapan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat akan lebih baik.
- d. Untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah, diperlukan kebijakan dibidang pengembangan institusi dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan disini merupakan usaha penyempurnaan lembaga keuangan daerah, penerapan sains dan teknologi, sistem dan prosedur serta kekayaan daerah.
- e. Anggaran pembangunan disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tertentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragaman antar daerah. Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi terjadinya pemborosan sebagai akibat program pembangunan yang tumpang tindih.
- f. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

- g. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan dengan memperbanyak sampel dan memperpanjang kurun waktu sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, selain itu juga perlu diperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek psikologis dan personalitas pembuat keputusan atau faktor – faktor yang menyebabkan perubahan belanja pembangunan dan PAD

5.4. Implikasi

Dari simpulan penelitian ini memberikan implikasi yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah sehingga tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Implikasi-implikasi tersebut adalah ;

- a. Bagi Pemerintah daerah di masa otonomi dapat digunakan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah yang selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Membuka wawasan baru mengenai pengaruh Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah, dengan demikian dapat mendukung dan memberi pertimbangan dalam membuat keputusan yang lebih baik.
- c. Bagi kalangan akademisi pengembangan tentang pertumbuhan ekonomi dan variabel-variabel yang mempengaruhinya sangat diperlukan dengan harapan dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai kemandirian dan kemampuan suatu daerah dalam mengelola kekayaan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006, Hal 1-21
- Bastian, Indra, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 2001
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi I, BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992
- Brata, A.G., *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*, Lembaga penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004
- _____, *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Regional*, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004
- Brata, A.G., dan Z. Arifin, *Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia*, Media Ekonomi 13 (20) 2003, Hal 59-71
- Hadi, Syamsul, *Memfaatkan Exel Untuk Analisis Statistik*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004
- Halim, Abdul, *Analisis Diskriptif Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah*, Kompak, STIE YO, Yogyakarta, 2002, Hal 127-146
- _____, *Anggaran Daerah dan Fiskal stress (sebuah studi kasus pada anggaran daerah propinsi di Indonesia)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2001

- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, *Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*, Usahawan No 06 tahun XXXV Juni 2006
- Kristiadi, J.B, *Masalah Sekitar Pendapatan Daerah*, Prima tahun XIV, LP3ES, Jakarta, 1991
- Kuncoro, M., *Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Prisma 4 1995, Hal 3-17
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI Yogyakarta, 2002
- _____, *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia, Jakarta, 2002
- Menteri Dalam Negeri, *Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan tatusaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah*
- Republik Indonesia, *UU No 34 Tahun 2000, tentang Perubahan UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- _____, *UU No 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah*
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D, *Ekonomi (Edisi Terjemahan)*, Edisi kedua belas jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
- Santoso, Singgih, *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003
- Sasana, Hadi, *Analisis Dampak pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, Antar Sektor di Kabupaten/Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 12 No. 2, September 2005, Hal 249-268

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE UI dengan Bina Grafika, Jakarta, 1985

Sub Direktorat Konsolidasi Neraca Regional, *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2001-2004*, BPS, Yogyakarta

_____, *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2001-2005*, BPS, Jakarta

_____, *Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/Kota 2001-2005*, BPS, Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3S, Jakarta, 1993

Todoro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991

Welly, Didit Udjiyanto, *Pengembangan Potensi Wilayah di Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1998-2002*, Antisipasi 9(No 1) 2005, Hal 77-91

Yuliati, Asnafiah, *Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi dalam menyongsong otonomi Daerah (Studi kasus kabupaten Sleman, DIY)*, KEBI, 2001, Hal 14-23

LAMPIRAN I

Ringkasan Produk Domestik Regional Bruto harga konstan 2000

Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatra

Tahun anggaran 2001 – 2005

(000)

| NO | KAB/KOTA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Kab. Simeuleu | 189.136.179 | 230.227.731 | 216.631.510 | 233.036.792 | 230.203.170 |
| 2 | Kab. Aceh Singkil | 444.653.001 | 450.341.408 | 457.374.714 | 466.708.219 | 684.571.552 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 1.411.510 | 1.440.470.750 | 986.705.521 | 1.059.356.720 | 1.168.632.457 |
| 4 | Kab. Aceh Tenggara | 732.660.319 | 761.295.315 | 466.069.865 | 516.481.160 | 662.531.257 |
| 5 | Kab Aceh Timur | 3.746.573.197 | 3.717.240.890 | 3.205.948.586 | 2.257.921.446 | 2.679.941.991 |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 1.329.947.408 | 1.347.002.859 | 1.396.358.545 | 933.532.044 | 914.613.326 |
| 7 | Kab. Aceh Barat | 1.539.684.268 | 1.624.976.454 | 845.814.898 | 893.151.542 | 1.007.443.809 |
| 8 | Kab. Aceh Besar | 1.610.568.312 | 1.661.799.309 | 1.730.789.868 | 1.881.636.384 | 1.497.158.212 |
| 9 | Kab. Pidie | 1.589.301.488 | 1.625.142.526 | 1.659.746.004 | 1.778.446.600 | 2.097.650.309 |
| 10 | Kab. Bireuen | 1.734.935.879 | 1.768.882.912 | 1.834.193.775 | 1.918.682.342 | 2.221.400.948 |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 15.925.119.213 | 15.200.592.656 | 16.667.069.674 | 14.625.958.343 | 9.989.965.395 |
| 12 | Kab. Aceh Barat Daya | - | - | 476.392.599 | 498.031.102 | 627.486.458 |
| 13 | Kab. Gayo Lues | - | - | 275.068.786 | 291.689.958 | 315.995.580 |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | - | - | 1.430.126.149 | 1.451.513.022 | 1.084.129.799 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 15 | Kab. Nagan Raya | - | - | - | 517.584.009 | 558.112.937 | 592.959.552 |
| 16 | Kab. Aceh Jaya | - | - | - | 323.243.262 | 345.540.500 | 272.637.618 |
| 17 | Kota Banda Aceh | 1.556.090.201 | 1.607.375.613 | 1.657.585.403 | 1.834.813.668 | 2.052.910.020 | |
| 18 | Kota Sabang | 157.999.592 | 165.352.159 | 183.628.814 | 193.471.215 | 196.833.229 | |
| 19 | Kota Langsa | - | 753.682.961 | 776.654.149 | 830.336.171 | 734.324.548 | |
| 20 | Kota Lhoksumawe | - | 6.010.727.556 | 6.181.853.097 | 6.311.170.368 | 6.175.609.187 | |
| 21 | Kab. Nias | 2.127.590.445 | 2.318.292.722 | 2.486.101.712 | 1.610.824.567 | 1.552.602.973 | |
| 22 | Kab. Mandailing Natal | 1.199.557.995 | 1.251.079.056 | 1.336.444.612 | 1.409.579.510 | 1.492.091.870 | |
| 23 | Kab. Tapanuli Selatan | 2.695.279.493 | 2.235.960.963 | 2.423.839.955 | 2.500.236.817 | 2.584.566.253 | |
| 24 | Kab. Tapanuli Tengah | 709.115.056 | 743.632.940 | 800.260.886 | 845.860.344 | 889.371.591 | |
| 25 | Kab. Tapanuli Utara | 1.647.803.758 | 1.721.130.100 | 1.803.733.069 | 1.173.212.225 | 1.232.292.132 | |
| 26 | Kab. Toba Samosir | 1.430.782.218 | 1.530.791.094 | 2.296.125.085 | 1.289.294.323 | 1.354.439.148 | |
| 27 | Kab. Labuhan Batu | 7.304.529.900 | 7.628.178.920 | 7.936.345.090 | 8.215.913.180 | 8.533.064.300 | |
| 28 | Kab. Asahan | 8.220.039.776 | 8.426.608.248 | 9.037.635.903 | 9.484.024.525 | 9.768.117.693 | |
| 29 | Kab. Simalungun | 3.925.061.483 | 4.022.402.908 | 4.127.974.160 | 4.240.245.130 | 4.370.075.933 | |
| 30 | Kab. Dairi | 1.432.397.816 | 1.506.331.420 | 1.574.750.610 | 1.551.234.579 | 1.634.143.370 | |
| 31 | Kab. Karo | 2.217.015.109 | 2.283.125.694 | 2.403.276.309 | 2.483.415.272 | 2.600.325.580 | |
| 32 | Kab. Deli Serdang | 11.906.440.532 | 12.371.259.058 | 12.862.286.702 | 10.237.638.434 | 10.785.182.306 | |
| 33 | Kab. Langkat | 5.161.330.410 | 5.319.844.035 | 5.476.892.741 | 5.532.161.658 | 5.724.011.185 | |
| 34 | Kab. Humbang Hasundutan | - | - | - | 722.696.112 | 763.535.380 | |
| 35 | kab. Phakpak Bharat | - | - | - | 117.529.168 | 126.684.224 | |
| 36 | Kota Sibolga | 460.006.178 | 488.083.119 | 515.559.784 | 540.093.754 | 561.749.791 | |
| 37 | Kota Tanjung Balai | 912.886.144 | 962.539.208 | 1.034.661.801 | 1.096.234.219 | 1.142.134.020 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 38 | Kota Pematang Siantar | 1.361.757.316 | 1.389.814.321 | 1.503.888.382 | 1.561.475.945 | 1.649.967.572 |
| 39 | Kota Tebing Tinggi | 718.147.067 | 760.465.963 | 795.663.101 | 839.641.435 | 876.389.898 |
| 40 | Kota Medan | 19.828.076.300 | 20.819.429.349 | 22.017.775.549 | 23.623.135.559 | 25.271.631.954 |
| 41 | Kota Binjai | 1.156.613.363 | 1.233.404.823 | 1.345.309.318 | 1.466.450.756 | 1.540.906.610 |
| 42 | Kota Padang Sidempuan | - | 614.186.444 | 640.844.790 | 670.540.403 | 702.102.882 |
| 43 | Kab. Kep Mentawai | 355.407.211 | 377.011.610 | 398.191.109 | 414.703.508 | 428.727.810 |
| 44 | Kab. Pesisir Selatan | 1.359.473.113 | 1.415.794.261 | 1.477.405.122 | 1.546.833.848 | 1.625.743.400 |
| 45 | Kab. Solok | 1.711.898.160 | 1.787.936.073 | 1.875.606.384 | 1.519.410.890 | 1.608.661.410 |
| 46 | Kab. Sawahlunto/Sijunjung | 1.537.152.809 | 1.609.028.075 | 1.682.804.590 | 971.540.470 | 1.023.241.250 |
| 47 | Kab. Tanah Datar | 1.617.886.928 | 1.684.939.530 | 1.767.589.239 | 1.863.489.971 | 1.961.820.250 |
| 48 | Kab. Padang Pariaman | 2.016.503.158 | 2.111.232.900 | 1.703.313.674 | 1.793.018.953 | 1.971.582.459 |
| 49 | Kab. Agam | 1.873.790.139 | 1.962.785.518 | 2.066.647.626 | 2.190.815.657 | 2.325.161.690 |
| 50 | Kab. Lima Puluh Koto | 1.734.468.133 | 1.811.293.837 | 1.904.006.805 | 2.009.422.016 | 2.125.656.740 |
| 51 | kab. Solok selatan | - | - | - | 460.259.250 | 486.507.650 |
| 52 | Kab. Dharmasraya | - | - | - | 802.393.260 | 846.237.710 |
| 53 | Kab. Pasaman Barat | - | - | - | 1.866.612.799 | 1.988.702.870 |
| 54 | Kab. Pasaman | 2.412.153.982 | 2.531.812.676 | 2.672.792.550 | 967.925.448 | 1.022.262.670 |
| 55 | Kota Padang | 7.353.091.209 | 7.742.458.469 | 8.171.842.431 | 8.652.900.061 | 9.109.372.850 |
| 56 | Kota Solok | 323.982.401 | 338.047.382 | 353.221.228 | 372.398.886 | 394.216.630 |
| 57 | Kota Sawah Lunto | 427.030.209 | 425.663.314 | 419.190.646 | 436.113.317 | 444.294.990 |
| 58 | Kota Padang Panjang | 254.402.128 | 265.831.803 | 279.396.670 | 294.286.332 | 311.166.398 |
| 59 | Kota Bukittinggi | 616.840.584 | 645.877.209 | 680.527.726 | 719.828.855 | 762.433.070 |
| 60 | Kota Payakumbuh | 523.545.455 | 548.694.911 | 576.841.683 | 609.186.762 | 644.400.120 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 61 | Kota Pariaman | - | - | - | 509.106.000 | 535.807.455 | 561.912.439 |
| 62 | Kab. Kuantan seningi | 1.557.428.264 | 1.657.224.378 | 1.776.319.213 | 1.947.432.730 | 2.108.721.035 | |
| 63 | Kab. Indragiri Hulu | 2.340.987.962 | 2.490.723.044 | 2.655.264.142 | 2.828.937.238 | 3.049.075.280 | |
| 64 | Kab. Indragiri Hilir | 3.505.841.156 | 3.789.067.640 | 4.035.890.528 | 4.348.272.910 | 4.654.045.185 | |
| 65 | Kab. Pelalawan | 1.819.015.337 | 1.929.432.033 | 2.045.602.609 | 2.178.627.846 | 2.324.660.973 | |
| 66 | Kab. Siak | 13.573.466.156 | 13.496.869.592 | 13.547.740.203 | 13.536.064.460 | 14.205.285.709 | |
| 67 | Kab. Kampar | 6.496.086.695 | 6.703.762.416 | 6.895.013.463 | 6.990.186.787 | 7.237.875.194 | |
| 68 | Kab. Rokan Hulu | 1.534.045.114 | 1.633.744.781 | 1.743.850.238 | 1.867.431.568 | 1.988.121.136 | |
| 69 | Kab. Bengkalis | 22.604.401.757 | 22.912.284.171 | 22.880.198.820 | 23.150.328.071 | 24.221.545.787 | |
| 70 | Kab. Rokan Hilir | 9.370.582.273 | 9.723.700.315 | 9.886.233.365 | 9.794.409.762 | 10.197.334.524 | |
| 71 | Kab. Kep Riau | 2.996.220.845 | 1.698.591.205 | 1.767.002.868 | 1.428.306.739 | 1.495.879.946 | |
| 72 | Kab. Karimun | 1.222.931.129 | 1.293.753.183 | 1.363.907.336 | 1.432.777.901 | 1.513.127.468 | |
| 73 | Kab Natuna | 3.636.209.593 | 2.684.558.762 | 2.467.321.665 | 2.388.298.949 | 2.384.374.420 | |
| 74 | Kota Pekan Baru | 3.831.893.038 | 4.176.822.164 | 4.568.757.088 | 5.004.326.216 | 5.450.933.147 | |
| 75 | Kota Batam | 17.048.530.625 | 18.369.809.837 | 19.591.202.207 | 21.164.391.788 | 22.919.790.220 | |
| 76 | Kota Tanjung Pinang | - | 1.497.496.497 | 1.586.351.937 | 1.683.899.067 | 1.794.678.790 | |
| 77 | Kota Dumai | 2.772.052.599 | 2.645.568.333 | 2.697.833.861 | 2.915.727.081 | 2.959.624.399 | |
| 78 | Kab. Kerinci | 1.034.367.213 | 1.081.335.307 | 1.133.248.771 | 1.191.312.878 | 1.255.561.066 | |
| 79 | Kab. Merangin | 715.332.825 | 741.825.212 | 772.010.051 | 809.472.100 | 851.507.764 | |
| 80 | Kab. Sarolangun | 680.906.889 | 720.368.900 | 757.754.775 | 802.289.572 | 845.331.369 | |
| 81 | Kab. Batang Hari | 751.927.113 | 7.830.717.586 | 814.555.061 | 856.799.947 | 906.822.585 | |
| 82 | Kab. Muaro Jambi | 796.957.875 | 814.331.257 | 841.864.303 | 875.107.908 | 915.559.059 | |
| 83 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.561.242.361 | 1.685.513.609 | 1.725.651.541 | 1.780.784.845 | 1.846.095.977 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 84 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1.199.201.173 | 1.288.828.245 | 1.390.545.948 | 1.501.030.263 | 1.618.263.453 |
| 85 | Kab. Tebo | 555.727.226 | 579.328.275 | 604.305.312 | 633.254.412 | 663.283.727 |
| 86 | Kab. Bungo | 710.376.640 | 741.956.950 | 777.130.705 | 814.299.664 | 858.159.270 |
| 87 | Kota Jambi | 2.074.956.774 | 2.151.398.982 | 2.255.715.037 | 2.372.027.340 | 2.506.910.318 |
| 88 | Kab. Ogan Komering Ulu | 4.208.220.000 | 4.365.101.000 | 4.539.121.000 | 2.160.778.000 | 2.238.613.000 |
| 89 | Kab. Ogan Komering Ilir | 3.194.189.000 | 3.330.076.000 | 3.487.969.000 | 2.369.259.000 | 2.502.296.000 |
| 90 | Kab. Muara Enim | 6.579.056.000 | 5.793.206.000 | 6.046.639.000 | 6.268.454.000 | 6.533.437.000 |
| 91 | Kab. Lahat | 2.754.738.000 | 2.405.789.000 | 2.550.161.000 | 2.667.736.000 | 2.805.260.000 |
| 92 | Kab. Musi Rawas | 3.064.451.000 | 2.464.748.000 | 2.565.633.000 | 2.677.234.000 | 2.817.560.000 |
| 93 | Kab. Musi Banyu Asin | 11.943.219.000 | 12.287.355.000 | 9.516.107.000 | 9.696.003.000 | 9.982.326.000 |
| 94 | Kab. Banyuasin | - | - | 3.175.278.000 | 3.439.737.000 | 3.576.197.000 |
| 95 | Kota Palembang | 10.330.116.000 | 10.895.982.000 | 11.488.473.000 | 12.226.259.067 | 13.088.880.000 |
| 96 | Kota Prabhu Mulih | - | 972.082.000 | 1.016.810.000 | 1.059.701.000 | 1.103.392.000 |
| 97 | Kota Pagar Alam | - | 451.731.000 | 466.216.000 | 481.653.000 | 498.639.000 |
| 98 | Kota Lubuk Linggau | - | 707.221.000 | 745.297.000 | 788.634.000 | 835.441.000 |
| 99 | Kab. Bengkulu Selatan | 752.464.000 | 776.431.445 | 807.322.436 | 414.581.071 | 436.903.000 |
| 100 | Kab. Rejang Lebong | 1.900.404.000 | 1.971.506.000 | 2.034.039.000 | 1.223.018.457 | 1.308.372.000 |
| 101 | Kab. Bengkulu Utara | 1.107.784.000 | 1.155.092.000 | 1.214.393.000 | 860.559.941 | 909.210.936 |
| 102 | Kab. Kaur | - | - | - | 184.939.562 | 195.505.000 |
| 103 | Kab. Mukomoko | - | - | - | 416.753.059 | 440.021.000 |
| 104 | Kota Bengkulu | 1.289.993.000 | 1.356.890.000 | 1.431.098.000 | 1.503.901.000 | 1.589.060.000 |
| 105 | Kab. Lampung Barat | 1.013.900.616 | 1.057.149.442 | 1.120.832.104 | 1.184.322.067 | 1.238.965.744 |
| 106 | Kab. Tanggamus | 2.356.560.863 | 2.435.251.607 | 2.535.782.707 | 2.675.785.269 | 2.795.479.159 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 107 | Kab. Lampung Selatan | 3.558.874.829 | 3.697.854.590 | 3.823.555.664 | 3.987.720.712 | 4.156.669.563 |
| 108 | Kab. Lampung Timur | 2.883.407.525 | 3.350.114.716 | 3.521.991.097 | 3.553.613.736 | 3.538.206.142 |
| 109 | Kab. Lampung Tengah | 3.788.060.527 | 3.966.855.461 | 4.189.319.358 | 4.447.678.041 | 4.674.849.396 |
| 110 | Kab. Lampung Utara | 2.114.648.835 | 2.187.694.796 | 2.299.742.835 | 2.423.303.832 | 2.539.577.564 |
| 111 | Kab. Way Kanan | 918.207.006 | 955.151.196 | 994.641.408 | 1.040.793.035 | 1.087.395.617 |
| 112 | Kab. Tulang Bawang | 3.023.446.391 | 3.141.399.288 | 3.289.148.696 | 3.437.441.129 | 3.590.696.305 |
| 113 | Kota Bandar Lampung | 3.692.641.337 | 3.853.113.943 | 4.229.428.028 | 4.554.823.650 | 4.763.166.356 |
| 114 | Kota Metro | 349.392.606 | 361.051.127 | 383.968.276 | 408.799.688 | 427.014.442 |
| 115 | Kab Bangka | 4.353.714.484 | 4.598.459.047 | 4.853.551.701 | 1.375.932.854 | 1.452.274.518 |
| 116 | Kab. Belitung | 1.244.378.309 | 1.312.605.284 | 1.394.749.039 | 868.791.408 | 911.315.271 |
| 117 | Kab. Bangka Barat | - | - | - | 1.808.615.407 | 1.907.726.039 |
| 118 | Kab. Bangka Tengah | - | - | - | 977.544.921 | 1.028.782.354 |
| 119 | Kab. Belitung Timur | - | - | - | 595.770.315 | 629.428.063 |
| 120 | Kota Pangkal Pinang | 826.523.272 | 869.077.816 | 945.145.192 | 981.611.198 | 1.029.817.627 |



LAMPIRAN 2

Ringkasan Realisasi Belanja Pembangunan

Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Sumatra

Tahun Anggaran 2001-2005

(000)

| NO | KAB/KOTA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Simeuleu | 67.200.000 | 103.020.000 | 80.810.960 | 71.496.410 | 92.012.561 |
| 2 | Kab. Aceh Singkil | 86.838.460 | 96.545.058 | 86.680.827 | 40.800.508 | 49.785.210 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 73.239.892 | 77.249.544 | 79.408.231 | 102.914.344 | 44.022.470 |
| 4 | Kab. Aceh Tenggara | 81.213.109 | 81.865.005 | 38.675.756 | 113.645.955 | 37.900.540 |
| 5 | Kab Aceh Timur | 127.473.322 | 179.690.769 | 119.107.217 | 144.796.558 | 45.888.700 |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 101.276.192 | 92.419.016 | 60.381.933 | 50.987.388 | 35.728.920 |
| 7 | Kab. Aceh Barat | 72.653.373 | 115.832.126 | 63.901.034 | 54.783.382 | 62.012.560 |
| 8 | Kab. Aceh Besar | 111.497.771 | 91.155.305 | 207.762.588 | 93.605.384 | 19.897.871 |
| 9 | Kab. Pidie | 102.825.376 | 98.968.140 | 41.304.077 | 75.704.003 | 77.852.250 |
| 10 | Kab. Bireuen | 83.352.316 | 48.000.533 | 85.671.170 | 33.665.436 | 58.888.750 |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 281.298.869 | 92.400.149 | 166.739.547 | 320.753.085 | 343.071.660 |
| 12 | Kab. Aceh Barat Daya | - | - | 19.719.938 | 64.504.296 | 52.744.300 |
| 13 | Kab. Gayo Lues | - | - | 26.288.173 | 89.098.210 | 91.520.360 |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | - | - | 13.839.886 | 98.689.396 | 49.841.900 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 15 | Kab. Nagan Raya | - | - | - | 41.367.420 | 69.945.115 | 63.240.820 |
| 16 | Kab. Aceh Jaya | - | - | - | 47.772.218 | 87.067.281 | 89.852.020 |
| 17 | Kota Banda Aceh | 62.428.248 | 55.309.481 | 31.654.639 | 40.651.163 | 34.409.900 | |
| 18 | Kota Sabang | 82.426.634 | 72.213.756 | 91.357.803 | 43.753.957 | 44.785.650 | |
| 19 | Kota Langsa | - | 45.974.639 | 47.094.621 | 74.363.189 | 22.282.240 | |
| 20 | Kota Lhoksumawe | - | 12.356.796 | 14.548.947 | 24.987.178 | 67.874.210 | |
| 21 | Kab. Nias | 99.400.180 | 123.396.764 | 67.773.857 | 7.016.020 | 8.564.560 | |
| 22 | Kab. Mandailing Natal | 83.422.481 | 99.185.335 | 60.236.148 | 50.464.773 | 54.230.120 | |
| 23 | Kab. Tapanuli Selatan | 60.420.832 | 74.388.000 | 80.094.587 | 82.910.796 | 67.189.360 | |
| 24 | Kab. Tapanuli Tengah | 39.120.268 | 78.097.887 | 87.453.082 | 67.294.333 | 68.521.320 | |
| 25 | Kab. Tapanuli Utara | 97.329.881 | 80.842.220 | 109.439.741 | 11.862.962 | 36.805.710 | |
| 26 | Kab. Toba Samosir | 62.066.602 | 70.776.052 | 85.959.037 | 23.611.245 | 15.283.680 | |
| 27 | Kab. Labuhan Batu | 49.341.560 | 64.288.360 | 76.830.712 | 73.568.234 | 80.961.000 | |
| 28 | Kab. Asahan | 62.482.236 | 95.616.400 | 91.770.239 | 62.089.355 | 65.425.660 | |
| 29 | Kab. Simalungun | 95.096.892 | 114.871.994 | 142.224.719 | 38.191.613 | 40.052.360 | |
| 30 | Kab. Dairi | 30.316.240 | 48.849.230 | 24.127.958 | 3.189.985 | 14.264.950 | |
| 31 | Kab. Karo | 21.597.252 | 40.200.000 | 59.302.956 | 51.994.782 | 42.067.870 | |
| 32 | Kab. Deli Serdang | 82.262.306 | 118.450.082 | 165.013.642 | 25.719.254 | 31.000.660 | |
| 33 | Kab. Langkat | 58.636.791 | 84.495.011 | 121.388.545 | 65.196.787 | 76.059.720 | |
| 34 | Kab. Humbang Hasundutan | - | - | - | - | 13.246.288 | 29.684.020 |
| 35 | Kab. Pakpak Bharat | - | - | - | - | 9.155.650 | 24.782.910 |
| 36 | Kota Sibolga | 567.469 | 39.658.305 | 47.394.481 | 42.290.998 | 42.604.460 | |
| 37 | Kota Tanjung Balai | 17.468.400 | 99.817.486 | 56.089.772 | 53.614.981 | 186.080 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 38 | Kota Pematang Siantar | 12.227.882 | 45.643.523 | 39.598.162 | 40.246.679 | 44.265.320 |
| 39 | Kota Tebing Tinggi | 21.080.476 | 45.247.230 | 53.053.356 | 31.454.727 | 35.757.820 |
| 40 | Kota Medan | 99.236.166 | 138.852.844 | 315.064.816 | 204.959.867 | 185.514.330 |
| 41 | Kota Binjai | 40.376.423 | 54.467.014 | 53.260.291 | 18.407.363 | 23.247.490 |
| 42 | Kota Padang Sidempuan | - | 22.497.976 | 23.582.084 | 26.127.165 | 29.165.450 |
| 43 | Kab. Kep Mentawai | 27.541.559 | 77.084.335 | 25.150.492 | 42.182.697 | 45.265.850 |
| 44 | Kab. Pesisir Selatan | 41.509.280 | 40.085.817 | 54.563.906 | 39.417.437 | 49.613.160 |
| 45 | Kab. Solok | 48.156.179 | 63.428.696 | 48.365.588 | 45.737.710 | 48.775.620 |
| 46 | Kab. Sawahlunto/Sijunjung | 24.591.241 | 65.808.634 | 45.761.370 | 39.211.583 | 41.520.080 |
| 47 | Kab. Tanah Datar | 24.693.617 | 59.609.022 | 44.378.878 | 35.534.992 | 42.926.470 |
| 48 | Kab. Padang Pariaman | 26.666.338 | 25.000.277 | 50.710.968 | 53.774.617 | 59.589.860 |
| 49 | Kab. Agam | 38.280.578 | 61.143.734 | 34.529.930 | 18.854.256 | 18.389.070 |
| 50 | Kab. Lima Puluh Koto | 28.202.230 | 45.824.370 | 48.225.857 | 65.855.332 | 29.326.560 |
| 51 | Kab. Solok Selatan | - | - | - | 17.854.617 | 19.848.480 |
| 52 | Kab. Dharmas raya | - | - | - | 20.774.692 | 23.815.780 |
| 53 | Kab. Pasaman Barat | - | - | - | 22.355.349 | 24.399.240 |
| 54 | Kab. Pasaman | 56.788.843 | 64.210.547 | 56.467.340 | 62.015.756 | 22.928.980 |
| 55 | Kota Padang | 32.151.023 | 47.985.242 | 23.337.998 | 9.652.483 | 44.627.760 |
| 56 | Kota Solok | 11.660.822 | 26.626.494 | 14.354.129 | 33.778.217 | 28.438.130 |
| 57 | Kota Sawah Lunto | 14.011.572 | 23.506.735 | 43.602.898 | 31.274.804 | 31.023.930 |
| 58 | Kota Padang Panjang | 14.143.461 | 33.433.412 | 30.032.596 | 17.791.334 | 45.243.750 |
| 59 | Kota Bukittinggi | 12.351.965 | 0 | 23.565.725 | 21.340.722 | 34.922.520 |
| 60 | Kota Payakumbuh | 29.861.112 | 56.476.557 | 60.860.494 | 44.102.030 | 52.132.900 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 61 | Kota Pariaman | - | - | - | 7.624.688 | 14.379.752 | 42.479.450 |
| 62 | Kab. Kuantan seningi | 132.829.356 | 179.470.000 | 126.395.545 | 110.112.634 | 148.269.630 | |
| 63 | Kab. Indragiri Hulu | 156.562.324 | 172.693.311 | 135.385.528 | 143.000.406 | 115.167.390 | |
| 64 | Kab. Indragiri Hilir | 189.087.477 | 204.132.775 | 173.057.785 | 185.814.795 | 148.285.630 | |
| 65 | Kab. Pelalawan | 137.637.817 | 222.590.000 | 168.520.607 | 143.225.981 | 229.465.590 | |
| 66 | Kab. Siak | 259.361.337 | 615.190.000 | 377.043.658 | 356.647.744 | 377.562.330 | |
| 67 | Kab. Kampar | 279.145.694 | 299.625.416 | 322.922.327 | 166.711.964 | 246.576.230 | |
| 68 | Kab. Rokan Hulu | 125.950.132 | 136.681.560 | 86.848.131 | 49.041.062 | 141.351.420 | |
| 69 | Kab. Bengkalis | 789.190.258 | 1.028.497.068 | 744.885.331 | 732.117.758 | 753.461.250 | |
| 70 | Kab. Rokan Hilir | 377.341.732 | 420.950.000 | 430.339.597 | 268.364.758 | 492.650.040 | |
| 71 | Kab. Kep Riau | 70.138.366 | 125.590.000 | 59.784.997 | 62.958.162 | 49.765.016 | |
| 72 | Kab. Karimun | 90.570.956 | 174.570.000 | 101.092.696 | 60.575.244 | 42.700.272 | |
| 73 | Kab Natuna | 103.751.653 | 143.180.000 | 156.311.142 | 96.887.199 | 112.314.176 | |
| 74 | Kota Pekanbaru | 93.077.957 | 115.505.768 | 67.403.203 | 68.644.272 | 200.866.070 | |
| 75 | Kota Batam | 140.684.623 | 189.246.324 | 155.311.223 | 55.566.019 | 35.918.424 | |
| 76 | Kota Tanjung Pinang | - | 40.311.997 | 41.999.913 | 60.600.425 | 41.009.656 | |
| 77 | Kota Dumai | 142.150.000 | 115.540.000 | 78.506.747 | 58.087.196 | 113.282.720 | |
| 78 | Kab. Kerinci | 30.171.700 | 57.204.699 | 64.476.958 | 66.077.121 | 26.478.520 | |
| 79 | Kab. Merangin | 21.386.377 | 60.368.000 | 53.628.735 | 43.634.031 | 43.107.120 | |
| 80 | Kab. Sarolangun | 34.433.575 | 68.813.239 | 83.845.166 | 85.661.649 | 89.670.390 | |
| 81 | Kab. Batang Hari | 45.154.609 | 72.264.291 | 78.520.516 | 82.978.178 | 64.298.470 | |
| 82 | Kab. Muaro Jambi | 22.065.586 | 46.490.000 | 36.828.593 | 28.524.069 | 50.625.550 | |
| 83 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 25.569.082 | 55.221.343 | 76.878.445 | 82.288.174 | 143.169.420 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 84 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 48.004.921 | 61.503.741 | 77.516.215 | 57.033.966 | 68.224.190 |
| 85 | Kab. Tebo | 23.413.862 | 72.868.187 | 96.265.527 | 89.456.519 | 69.605.930 |
| 86 | Kab. Bungo | 42.567.911 | 53.997.669 | 52.171.984 | 21.659.824 | 42.592.060 |
| 87 | Kota Jambi | 11.920.162 | 28.907.048 | 49.907.541 | 63.632.988 | 28.675.650 |
| 88 | Kab. Ogan Komering Ulu | 75.483.510 | 79.090.492 | 76.064.532 | 59.457.560 | 21.700.180 |
| 89 | Kab. Ogan Komering Ilir | 113.196.843 | 142.185.916 | 160.239.594 | 158.935.089 | 72.477.090 |
| 90 | Kab. Muara Enim | 109.124.213 | 114.516.592 | 50.838.601 | 40.894.068 | 164.555.170 |
| 91 | Kab. Lahat | 64.601.566 | 48.537.706 | 70.881.361 | 49.105.063 | 3.036.640 |
| 92 | Kab. Musi Rawas | 66.766.015 | 139.457.376 | 72.189.431 | 73.435.999 | 104.329.440 |
| 93 | Kab. Musi Banyu Asin | 237.258.701 | 293.581.759 | 179.043.021 | 183.110.193 | 193.791.420 |
| 94 | Kab. Banyuasin | - | - | 51.191.716 | 73.187.272 | 75.862.030 |
| 95 | Kota Palembang | 104.342.404 | 100.792.359 | 89.572.752 | 61.026.930 | 149.186.280 |
| 96 | Kota Prabou Mulih | - | 40.838.594 | 43.319.856 | 33.890.447 | 85.377.530 |
| 97 | Kota Pagar Alam | - | 48.090.048 | 50.134.257 | 40.049.152 | 75.919.840 |
| 98 | Kota Lubuk Linggau | - | 37.134.824 | 39.598.771 | 31.628.752 | 59.601.990 |
| 99 | Kab. Bengkulu Selatan | 65.794.424 | 34.148.968 | 40.774.831 | 5.083.761 | 8.190.600 |
| 100 | Kab. Rejang Lebong | 29.704.934 | 38.486.929 | 62.277.641 | 48.645.936 | 17.600.670 |
| 101 | Kab. Bengkulu Utara | 35.047.300 | 33.685.882 | 58.703.592 | 35.596.494 | 39.556.660 |
| 102 | Kab. Kaur | - | - | - | 13.291.670 | 18.090.510 |
| 103 | kab. Mukomuko | - | - | - | 26.000.220 | 35.290.180 |
| 104 | Kota Bengkulu | 8.282.124 | 24.981.179 | 40.113.511 | 50.495.893 | 46.320.510 |
| 105 | Kab. Lampung Barat | 45.350.980 | 64.161.698 | 64.995.910 | 30.287.006 | 50.834.480 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 106 | Kab. Tanggamus | 5.832.115 | 32.945.102 | 26.254.061 | 45.681.205 | 61.037.130 |
| 107 | Kab. Lampung Selatan | 12.881.729 | 52.811.955 | 73.807.200 | 20.486.845 | 28.074.940 |
| 108 | Kab. Lampung Timur | 69.623.808 | 23.977.007 | 91.472.652 | 56.719.044 | 59.872.550 |
| 109 | Kab. Lampung Tengah | 19.402.759 | 33.820.560 | 41.040.846 | 18.076.906 | 44.119.370 |
| 110 | Kab. Lampung Utara | 106.293.010 | 64.185.987 | 75.607.147 | 19.199.758 | 37.330.900 |
| 111 | Kab. Way Kanan | 43.232.052 | 74.033.927 | 55.534.937 | 53.261.382 | 55.742.980 |
| 112 | Kab. Tulang Bawang | 38.909.529 | 56.520.229 | 82.347.118 | 86.725.550 | 64.548.500 |
| 113 | Kota Bandar Lampung | 40.604.553 | 41.207.275 | 97.227.687 | 45.692.085 | 60.098.650 |
| 114 | Kota Metro | 47.812.207 | 47.879.054 | 62.519.194 | 33.688.575 | 23.930.930 |
| 115 | Kab. Bangka | 58.613.406 | 99.714.284 | 66.012.483 | 19.868.959 | 45.422.582 |
| 116 | Kab. Belitung | 5.671.059 | 24.888.442 | 41.986.819 | 19.823.751 | 39.653.987 |
| 117 | Kab. Bangka Barat | - | - | - | 16.346.208 | 23.757.752 |
| 118 | Kab. Bangka Tengah | - | - | - | 10.937.500 | 42.453.830 |
| 119 | Kab. Belitung Timur | - | - | - | 10.630.208 | 36.691.579 |
| 120 | Kota Pangkal Pinang | 13.067.216 | 34.978.667 | 35.331.067 | 30.756.892 | 51.635.651 |

LAMPIRAN 3

Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten/ Kota Se- Sumatra

Tahun Anggaran 2001-2005

(000)

| NO | KAB/KOTA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kab. Simeuleu | 1.730.000 | 5.620.000 | 11.601.441 | 15.531.609 | 17.839.450 |
| 2 | Kab. Aceh Singkil | 2.755.611 | 5.951.604 | 8.230.292 | 5.500.000 | 7.548.560 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 2.334.305 | 2.356.139 | 6.904.488 | 4.275.879 | 5.021.950 |
| 4 | Kab. Aceh Tenggara | 2.442.259 | 3.936.717 | 5.016.250 | 6.272.096 | 5.793.680 |
| 5 | Kab Aceh Timur | 4.372.795 | 9.462.035 | 8.705.044 | 15.958.897 | 5.804.270 |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 3.525.762 | 5.063.895 | 6.944.749 | 5.764.990 | 5.363.500 |
| 7 | Kab. Aceh Barat | 3.912.590 | 5.069.214 | 7.862.783 | 8.798.292 | 9.752.560 |
| 8 | Kab. Aceh Besar | 3.048.300 | 4.134.200 | 5.682.500 | 6.722.750 | 7.749.567 |
| 9 | Kab. Pidie | 3.744.999 | 2.265.171 | 5.587.340 | 6.285.760 | 7.521.630 |
| 10 | Kab. Bireuen | 2.366.332 | 2.664.000 | 3.390.770 | 4.273.842 | 7.677.000 |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 12.533.050 | 10.507.961 | 37.774.710 | 49.284.643 | 29.626.570 |
| 12 | Kab. Aceh Barat Daya | - | - | 626.150 | 875.120 | 4.000.640 |
| 13 | Kab. Gayo Lues | - | - | 831.390 | 994.350 | 1.115.010 |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | - | - | 757.980 | 10.235.119 | 7.802.070 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15 | Kab. Nagan Raya | - | - | - | 923.954 | 1.208.712 | 2.862.310 |
| 16 | Kab. Aceh Jaya | - | - | - | 6.930.089 | 9.817.288 | 10.524.860 |
| 17 | Kota Banda Aceh | 5.476.222 | 6.008.136 | 4.020.581 | 7.041.127 | 5.143.500 | |
| 18 | Kota Sabang | 1.580.774 | 2.726.256 | 6.389.508 | 8.987.311 | 9.870.520 | |
| 19 | Kota Langsa | - | 2.436.879 | 3.835.748 | 4.298.356 | 4.626.850 | |
| 20 | Kota Lhoksumawe | - | 8.597.786 | 9.686.370 | 7.436.528 | 9.711.920 | |
| 21 | Kab. Nias | 5.469.232 | 5.519.809 | 10.929.945 | 10.565.029 | 12.036.050 | |
| 22 | Kab. Mandailing Natal | 1.943.576 | 5.889.500 | 6.551.823 | 7.250.000 | 9.568.620 | |
| 23 | Kab. Tapanuli Selatan | 4.305.466 | 6.690.949 | 7.879.346 | 8.574.660 | 6.983.200 | |
| 24 | Kab. Tapanuli Tengah | 3.020.770 | 3.896.364 | 5.433.747 | 5.288.398 | 6.895.650 | |
| 25 | Kab. Tapanuli Utara | 4.342.558 | 7.600.379 | 11.252.649 | 5.733.443 | 5.814.790 | |
| 26 | Kab. Toba Samosir | 10.691.951 | 10.867.825 | 12.164.909 | 11.604.842 | 8.617.020 | |
| 27 | Kab. Labuhan Batu | 8.383.322 | 10.640.585 | 25.630.556 | 21.152.751 | 23.398.850 | |
| 28 | Kab. Asahan | 15.569.182 | 24.078.223 | 22.626.588 | 21.684.666 | 23.458.960 | |
| 29 | Kab. Simalungun | 11.796.208 | 7.012.213 | 17.493.101 | 17.857.576 | 18.822.380 | |
| 30 | Kab. Dairi | 3.987.533 | 3.806.299 | 4.742.508 | 4.354.230 | 5.243.100 | |
| 31 | Kab. Karo | 4.688.605 | 6.195.713 | 9.310.352 | 10.459.592 | 11.091.720 | |
| 32 | Kab. Deli Serdang | 26.996.853 | 34.077.313 | 51.910.663 | 43.528.205 | 59.145.800 | |
| 33 | Kab. Langkat | 9.361.131 | 11.909.571 | 14.813.910 | 16.570.134 | 16.834.740 | |
| 34 | Kab. Humbang Hasundutan | - | - | - | 2.668.151 | 3.087.310 | |
| 35 | Kab. Pakpak Bharat | - | - | - | 283.360 | 1.376.000 | |
| 36 | Kota Sibolga | 2.463.313 | 2.828.110 | 7.135.535 | 5.782.969 | 5.822.470 | |
| 37 | Kota Tanjung Balai | 4.140.491 | 6.622.088 | 9.933.585 | 8.712.055 | 9.574.570 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 38 | Kota Pematang Siantar | 7.731.528 | 11.010.743 | 11.563.236 | 13.603.647 | 15.462.960 |
| 39 | Kota Tebing Tinggi | 4.118.449 | 4.198.885 | 6.263.263 | 6.230.879 | 6.851.240 |
| 40 | Kota Medan | 88.262.844 | 129.103.734 | 233.786.690 | 271.618.428 | 282.218.790 |
| 41 | Kota Binjai | 3.909.632 | 4.974.913 | 8.312.932 | 12.962.969 | 13.002.790 |
| 42 | Kota Padang Sidempuan | - | 2.875.559 | 3.483.637 | 3.918.450 | 4.523.640 |
| 43 | Kab. Kep Mentawai | 617.627 | 3.588.982 | 9.112.120 | 12.020.454 | 14.238.880 |
| 44 | Kab. Pesisir Selatan | 2.897.279 | 5.172.733 | 9.680.364 | 7.244.653 | 8.973.800 |
| 45 | Kab. Solok | 5.080.833 | 6.444.500 | 12.355.964 | 14.993.000 | 16.882.660 |
| | Kab. | | | | | |
| 46 | Sawahlunto/Sijunjung | 7.140.714 | 7.261.231 | 19.949.324 | 20.721.156 | 10.439.960 |
| 47 | Kab. Tanah Datar | 4.877.811 | 3.732.300 | 11.931.505 | 15.338.621 | 17.422.480 |
| 48 | Kab. Padang Pariaman | 4.552.833 | 6.085.708 | 11.029.355 | 9.559.377 | 10.270.200 |
| 49 | Kab. Agam | 3.563.438 | 4.593.656 | 11.718.358 | 11.316.909 | 13.101.150 |
| 50 | Kab. Lima Puluh Koto | 2.741.635 | 3.144.950 | 12.760.283 | 10.016.297 | 11.114.890 |
| 51 | Kab. Solok Selatan | - | - | - | 5.116.480 | 5.230.180 |
| 52 | Kab. Dharmas raya | - | - | - | 6.885.870 | 7.732.780 |
| 53 | Kab. Pasaman Barat | - | - | - | 11.336.480 | 12.444.340 |
| 54 | Kab. Pasaman | 6.011.106 | 7.315.456 | 16.504.015 | 12.164.570 | 8.391.410 |
| 55 | Kota Padang | 39.282.627 | 54.083.435 | 63.932.547 | 77.938.056 | 102.546.200 |
| 56 | Kota Solok | 2.152.769 | 2.148.947 | 7.262.073 | 5.325.150 | 4.811.870 |
| 57 | Kota Sawah Lunto | 2.352.018 | 3.377.536 | 8.434.992 | 9.136.349 | 12.201.650 |
| 58 | Kota Padang Panjang | 2.341.843 | 2.422.659 | 6.708.002 | 5.627.822 | 6.680.600 |
| 59 | Kota Bukittinggi | 8.413.592 | 10.040.602 | 15.279.874 | 22.454.612 | 27.613.030 |
| 60 | Kota Payakumbuh | 4.652.715 | 8.358.736 | 13.715.902 | 21.570.278 | 21.875.410 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 61 | Kota Pariaman | - | - | 1.217.375 | 2.054.000 | 3.229.500 |
| 62 | Kab. Kuantan seningi | 3.651.628 | 4.500.000 | 5.752.466 | 7.211.894 | 10.172.940 |
| 63 | Kab. Indragiri Hulu | 3.000.000 | 3.799.116 | 5.337.480 | 5.528.916 | 11.273.980 |
| 64 | Kab. Indragiri Hilir | 16.658.144 | 17.554.688 | 21.303.477 | 28.827.675 | 20.610.300 |
| 65 | Kab. Pelalawan | 3.511.373 | 5.170.000 | 9.187.910 | 5.990.000 | 10.172.940 |
| 66 | Kab. Siak | 36.616.484 | 19.410.000 | 68.410.489 | 54.699.038 | 56.875.520 |
| 67 | Kab. Kampar | 9.261.796 | 14.989.203 | 31.505.419 | 22.215.695 | 26.265.940 |
| 68 | Kab. Rokan Hulu | 2.150.692 | 4.519.264 | 8.600.880 | 6.318.776 | 11.500.000 |
| 69 | Kab. Bengkalis | 20.509.513 | 24.150.462 | 38.884.556 | 39.612.367 | 41.231.650 |
| 70 | Kab. Rokan Hilir | 27.158.518 | 12.030.000 | 33.075.580 | 26.142.614 | 32.247.440 |
| 71 | Kab. Kep Riau | 69.496.097 | 58.885.000 | 54.773.558 | 53.892.000 | 58.551.191 |
| 72 | Kab. Karimun | 59.500.755 | 86.200.000 | 25.917.640 | 27.305.088 | 28.334.500 |
| 73 | Kab Natuna | 568.747 | 5.170.000 | 3.001.000 | 4.674.906 | 2.900.000 |
| 74 | Kota Pekanbaru Baru | 37.615.519 | 37.785.105 | 58.701.849 | 80.514.717 | 87.000.000 |
| 75 | Kota Batam | 29.835.000 | 47.655.000 | 56.379.183 | 56.050.500 | 63.713.000 |
| 76 | Kota Tanjung Pinang | - | 10.401.849 | 11.598.975 | 16.484.247 | 17.739.181 |
| 77 | Kota Dumai | 5.280.000 | 8.580.000 | 11.590.603 | 10.779.080 | 20.363.410 |
| 78 | Kab. Kerinci | 3.617.448 | 5.699.601 | 8.566.441 | 11.548.218 | 14.531.550 |
| 79 | Kab. Merangin | 4.832.907 | 5.105.920 | 11.101.307 | 11.834.969 | 11.459.320 |
| 80 | Kab. Sarolangun | 3.242.383 | 6.410.115 | 5.307.785 | 5.812.568 | 8.547.700 |
| 81 | Kab. Batang Hari | 3.570.412 | 7.954.609 | 11.334.253 | 8.099.253 | 18.029.240 |
| 82 | Kab. Muaro Jambi | 5.593.070 | 8.330.000 | 10.782.483 | 14.238.912 | 10.073.400 |
| 83 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.750.661 | 3.210.000 | 7.422.500 | 7.956.000 | 8.640.050 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 84 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 7.405.006 | 7.203.689 | 15.573.349 | 17.469.244 | 14.605.780 |
| 85 | Kab. Tebo | 9.117.796 | 6.380.234 | 18.543.121 | 7.926.770 | 12.574.790 |
| 86 | Kab. Bungo | 11.387.457 | 13.028.269 | 28.021.236 | 22.514.558 | 17.629.840 |
| 87 | Kota Jambi | 15.091.878 | 17.449.008 | 23.436.357 | 27.452.661 | 28.358.300 |
| 88 | Kab. Ogan Komering Ulu | 9.235.421 | 8.312.547 | 16.853.725 | 17.151.245 | 1.802.860 |
| 89 | Kab. Ogan Komering Ilir | 9.277.432 | 10.734.441 | 13.824.127 | 16.132.122 | 10.212.080 |
| 90 | Kab. Muara Enim | 20.024.268 | 16.512.278 | 27.078.417 | 37.048.197 | 34.819.450 |
| 91 | Kab. Lahat | 6.039.567 | 7.363.575 | 10.138.490 | 13.311.565 | 18.332.440 |
| 92 | Kab. Musi Rawas | 10.571.504 | 8.687.611 | 13.133.824 | 11.938.339 | 12.001.810 |
| 93 | Kab. Musi Banyu Asin | 8.826.895 | 11.095.139 | 23.880.870 | 25.543.466 | 10.367.500 |
| 94 | Kab. Banyuasin | - | - | 3.024.035 | 3.925.336 | 5.210.350 |
| 95 | Kota Palembang | 35.501.298 | 36.037.251 | 57.494.301 | 76.137.954 | 92.504.030 |
| 96 | Kota Prabou Mulih | - | 7.423.759 | 8.523.579 | 4.770.000 | 6.628.590 |
| 97 | Kota Pagar Alam | - | 4.003.301 | 4.027.619 | 3.997.819 | 4.182.830 |
| 98 | Kota Lubuk Linggau | - | 10.349.801 | 11.432.283 | 8.844.030 | 15.000.000 |
| 99 | Kab. Bengkulu Selatan | 4.204.394 | 8.826.602 | 4.595.164 | 7.780.393 | 5.462.820 |
| 100 | Kab. Rejang Lebong | 4.526.054 | 6.036.845 | 7.535.240 | 15.735.237 | 10.665.200 |
| 101 | Kab. Bengkulu Utara | 15.759.692 | 5.130.000 | 8.820.167 | 4.398.107 | 6.392.320 |
| 102 | Kab. Kaur | - | - | - | 601.300 | 1.067.650 |
| 103 | kab. Mukomuko | - | - | - | 1.154.250 | 1.219.480 |
| 104 | Kota Bengkulu | 5.377.246 | 5.186.070 | 9.904.640 | 16.252.277 | 16.979.850 |
| 105 | Kab. Lampung Barat | 2.054.019 | 1.789.093 | 5.394.418 | 4.640.077 | 4.671.180 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 106 | Kab. Tanggamus | 2.799.247 | 3.196.285 | 7.607.215 | 10.003.885 | 10.000.000 |
| 107 | Kab. Lampung Selatan | 9.811.724 | 8.754.244 | 11.928.096 | 12.854.373 | 16.229.870 |
| 108 | Kab. Lampung Timur | 2.903.890 | 3.450.502 | 6.892.305 | 10.000.000 | 12.535.980 |
| 109 | Kab. Lampung Tengah | 7.033.420 | 6.556.573 | 10.125.006 | 9.524.937 | 10.543.960 |
| 110 | Kab. Lampung Utara | 4.562.010 | 6.090.880 | 7.577.277 | 7.943.163 | 8.369.000 |
| 111 | Kab. Way Kanan | 604.975 | 834.353 | 3.880.548 | 2.585.973 | 3.614.550 |
| 112 | Kab. Tulang Bawang | 2.195.498 | 3.203.491 | 6.862.727 | 9.270.658 | 5.118.000 |
| 113 | Kota Bandar Lampung | 23.696.669 | 30.158.227 | 35.511.796 | 38.857.521 | 46.195.210 |
| 114 | Kota Metro | 4.478.011 | 4.529.174 | 10.098.045 | 10.069.294 | 11.256.800 |
| 115 | Kab Bangka | 29.224.973 | 16.856.410 | 31.953.993 | 12.616.270 | 17.926.298 |
| 116 | Kab. Belitung | 12.391.126 | 16.191.987 | 22.005.775 | 12.584.927 | 17.155.098 |
| 117 | Kab. Bangka Barat | - | - | - | 9.177.185 | 10.075.229 |
| 118 | Kab. Bangka Tengah | - | - | - | 7.681.448 | 13.420.658 |
| 119 | Kab. Belitung Timur | - | - | - | 5.800.878 | 12.116.001 |
| 120 | Kota Pangkal Pinang | 8.157.175 | 8.087.252 | 10.065.797 | 9.396.836 | 16.960.438 |

LAMPIRAN 4
HASIL PENGOLAHAN DATA

1. Regresi Belanja Pembangunan – Pertumbuhan Ekonomi

Variables Entered/Removed^d

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | blanja ^a | . | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ptmbuhan

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,653 ^a | ,426 | ,425 | 3243089529 |

a. Predictors: (Constant), blanja

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 4E+021 | 1 | 4,271E+021 | 406,097 | ,000 ^a |
| | Residual | 6E+021 | 547 | 1,052E+019 | | |
| | Total | 1E+022 | 548 | | | |

a. Predictors: (Constant), blanja

b. Dependent Variable: ptmbuhan

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 8E+008 | 2E+008 | | 4,599 | ,000 |
| | blanja | 28,182 | 1,399 | ,653 | 20,152 | ,000 |

a. Dependent Variable: ptmbuhan

2. Regresi Pendapatan Asli Daerah – Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Variables Entered/Removed^d

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | pad ^a | . | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ptmbuhan

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,646 ^a | ,417 | ,416 | 3268726478 |

a. Predictors: (Constant), pad

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 4E+021 | 1 | 4,180E+021 | 391,205 | ,000 ^a |
| | Residual | 6E+021 | 547 | 1,068E+019 | | |
| | Total | 1E+022 | 548 | | | |

a. Predictors: (Constant), pad

b. Dependent Variable: ptmbuhan

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1E+009 | 2E+008 | | 8,534 | ,000 |
| | pad | 113,786 | 5,753 | ,646 | 19,779 | ,000 |

a. Dependent Variable: ptmbuhan

3. Regresi Pendapatan Asli Daerah – Belanja Pembangunan

Variables Entered/Removed^d

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | pad ^a | . | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: blanja

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,261 ^a | ,068 | ,066 | 95714489,2 |

a. Predictors: (Constant), pad

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 4E+017 | 1 | 3,664E+017 | 39,998 | ,000 ^a |
| | Residual | 5E+018 | 547 | 9,161E+015 | | |
| | Total | 5E+018 | 548 | | | |

a. Predictors: (Constant), pad

b. Dependent Variable: blanja

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 6E+007 | 4791266 | | 13,487 | ,000 |
| | pad | 1,065 | ,168 | ,261 | 6,324 | ,000 |

a. Dependent Variable: blanja